



Menggagas Sistem Terintegrasi untuk Penerimaan Pajak dan Bukan-Pajak Sektor Minerba

Oleh:
Wawan Juswanto, Ph.D

Disampaikan pada:
Semiloka “Pelaksanaan Transparansi dan Upaya Perbaikan Tata Kelola Industri Kreatif”

Bandung, 13 November 2014



Kandungan Sumber Daya Alam Mineral Indonesia

Indonesia kaya akan kandungan hidrokarbon dan masuk ke dalam 10 negara teratas untuk cadangan emas, tembaga, timah dan bauksit.

Estimasi cadangan mineral, akhir 2013

Ranking	Gold	Copper	Nickel	Tin	Bauxite and Alumina
1	Australia	Chile	Australia	China	Guinea
2	South Africa	Australia	New Caledonia	Indonesia	Australia
3	Russia	Peru	Brazil	Brazil	Brazil
4	Chile	United States	Russia	Bolivia	Vietnam
5	Indonesia	Mexico	Cuba	Russia	Jamaica
6	United States	China	Indonesia	Peru	Indonesia
7	Brazil	Russia	South Africa	Malaysia	India
8	Peru	Indonesia	Canada	Australia	Guyana
9	China	Poland	China	Thailand	China
10	Uzbekistan	Congo (Kinshasa)	Madagascar	N/A	Greece

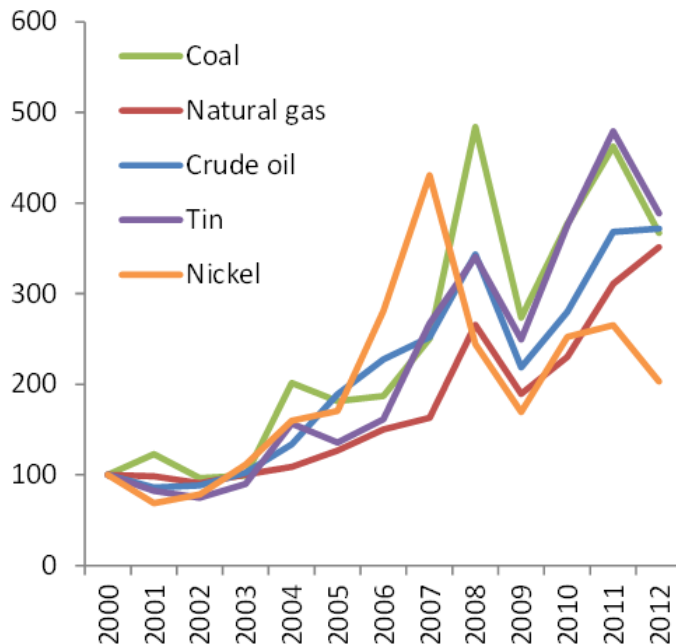
Sumber: USGS, 2013



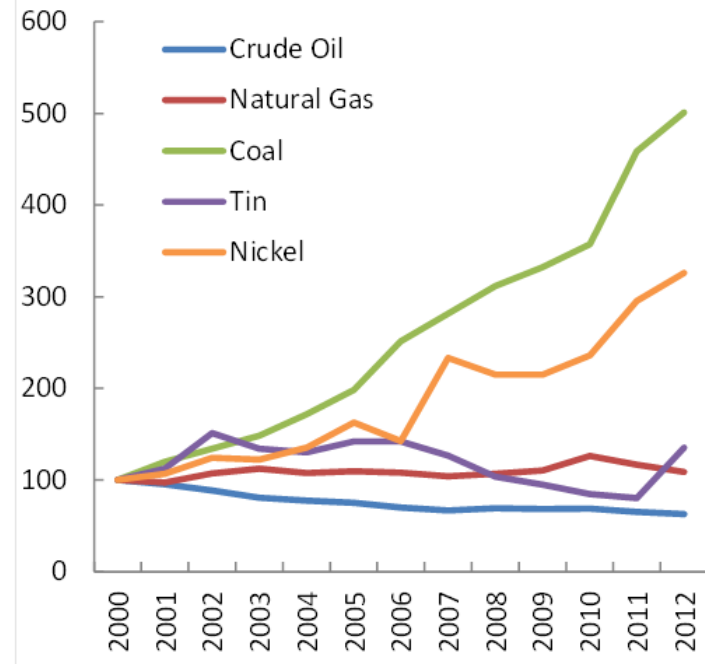
Kontribusi Sektor Ekstraktif dalam Perekonomian Nasional

- **Sektor SDA berkontribusi 11% dalam PDB dan 53% ekspor Indonesia (2012)**
- **Produksi dan ekspor komoditas menunjukkan pertumbuhan eksponensial selama 1 dekade terakhir.** Sumbangan sektor ekstraktif berkisar 2/5 dalam pertumbuhan PDB nominal dan 2/3 dalam pertumbuhan ekspor nominal selama 2002-2012
- **Pada beberapa daerah, sektor minerba merupakan aktivitas perekonomian dominan.**

(USD price index, 2000 = 100)



(Production Index, 2000 = 100)



Sumber: World Bank



Kontribusi Sektor Ekstraktif dalam Perekonomian Nasional



- Pendapatan negara yang bersumber dari sektor sumber daya alam masih menjadi kontributor signifikan dalam APBN.

PNBP 2013-2015

(miliar rupiah)

URAIAN	2013	APBN-P 2014	RAPBN 2015
Penerimaan SDA	226.406,2	241.114,6	236.698,8
Migas	203.629,4	211.668,2	206.803,4
Non Migas	22.776,8	29.446,4	29.895,4
Dividen BUMN	34.025,6	40.000,0	41.000,0
PNBP Lainnya	69.671,9	84.968,4	88.260,4
BLU	24.648,2	20.863,4	22.077,8
Total PNBP	354.751,9	386.946,4	388.037,0

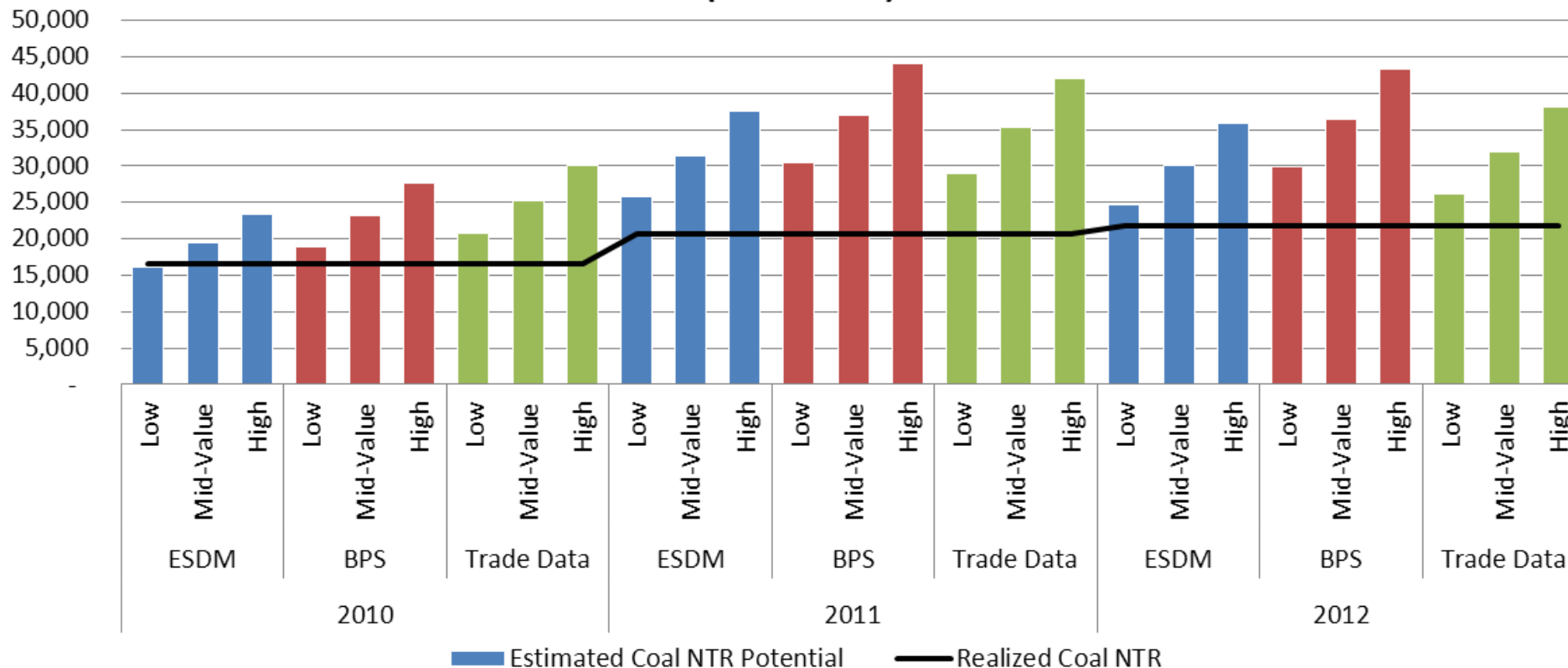
Jenis Pajak	2013				2014			
	APBN-P	Realisasi 31 Juli	% thd APBN-P	y-o-y	APBN-P	Realisasi 25 Juli	% thd APBN-P	y-o-y
I. Penerimaan Perpajakan	1.148,4	570,7	49,7	5,7	1.246,1	613,5	49,2	7,5
A. Penerimaan Pajak	995,2	484,0	48,6	5,9	1.072,4	519,9	48,5	7,4
PPh Nonmigas	464,5	236,9	51,0	4,3	486,0	256,9	52,9	8,5
PPh Migas	74,3	42,5	57,2	(9,5)	83,9	44,5	53,0	4,8
PPN dan PPnBM	423,7	200,6	47,3	13,3	475,6	214,1	45,0	6,7
PBB	27,3	1,2	4,2	(65,3)	21,7	1,1	4,9	(8,2)
Pajak Lainnya	5,4	2,9	53,3	15,3	5,2	3,3	63,6	14,5
B. Kepabeanan dan Cukai	153,2	86,7	56,6	4,7	173,7	93,6	53,9	8,0
Cukai	104,7	61,2	58,5	14,6	117,5	67,6	57,6	10,4
Bea Masuk	30,8	17,4	56,4	6,8	35,7	18,1	50,8	4,3
Bea Keluar	17,6	8,1	45,9	(38,3)	20,6	7,9	38,1	(2,7)

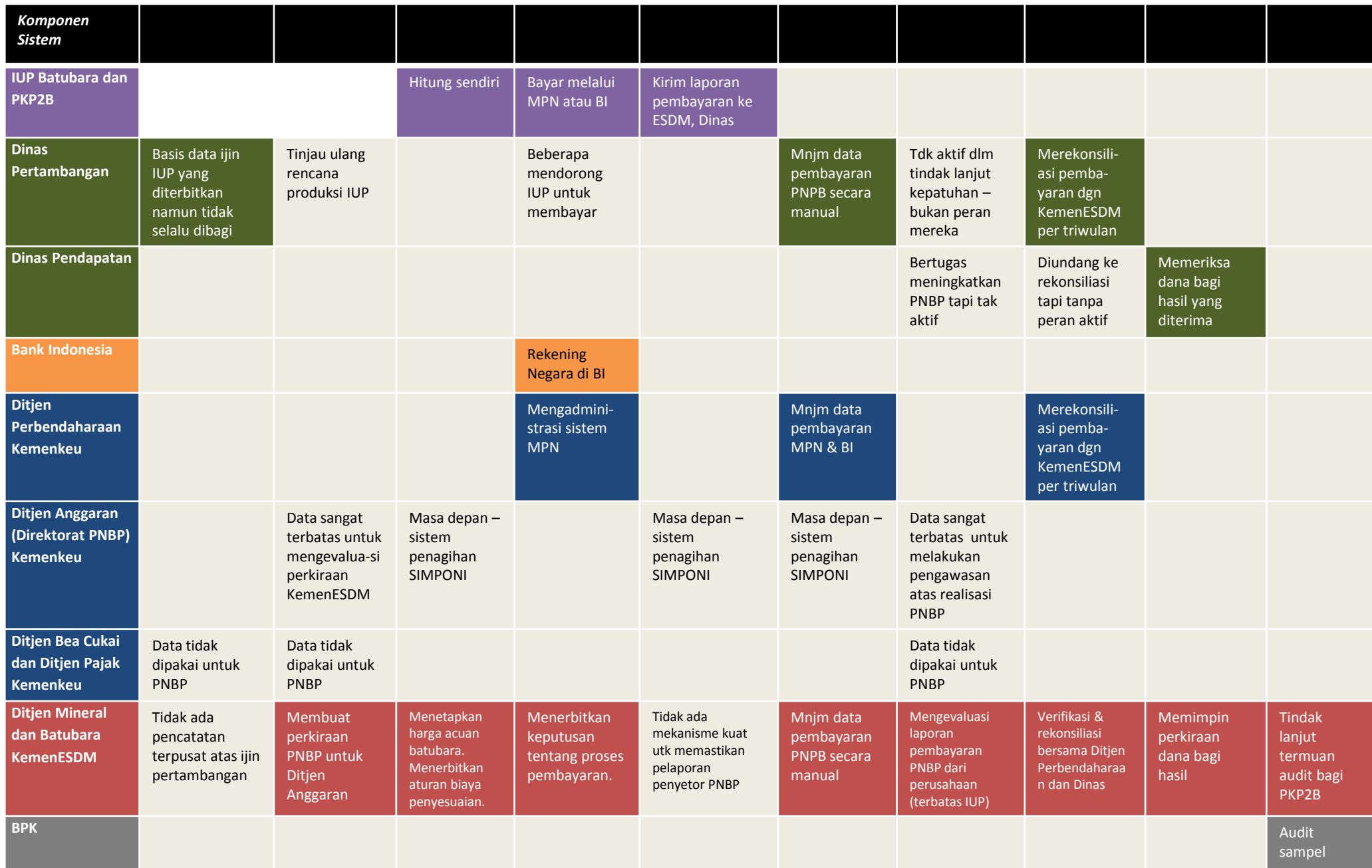


Potensi PNBP Pertambangan

- Hasil Studi World Bank menunjukkan adanya indikasi bahwa realisasi penerimaan PNBP pertambangan di bawah potensinya, akibat lemahnya sistem administrasi. Sebagai contoh, dengan menggunakan data perdagangan, opportunity loss potensi PNBP batubara di estimasi mencapai 43% selama tahun 2003-2012..

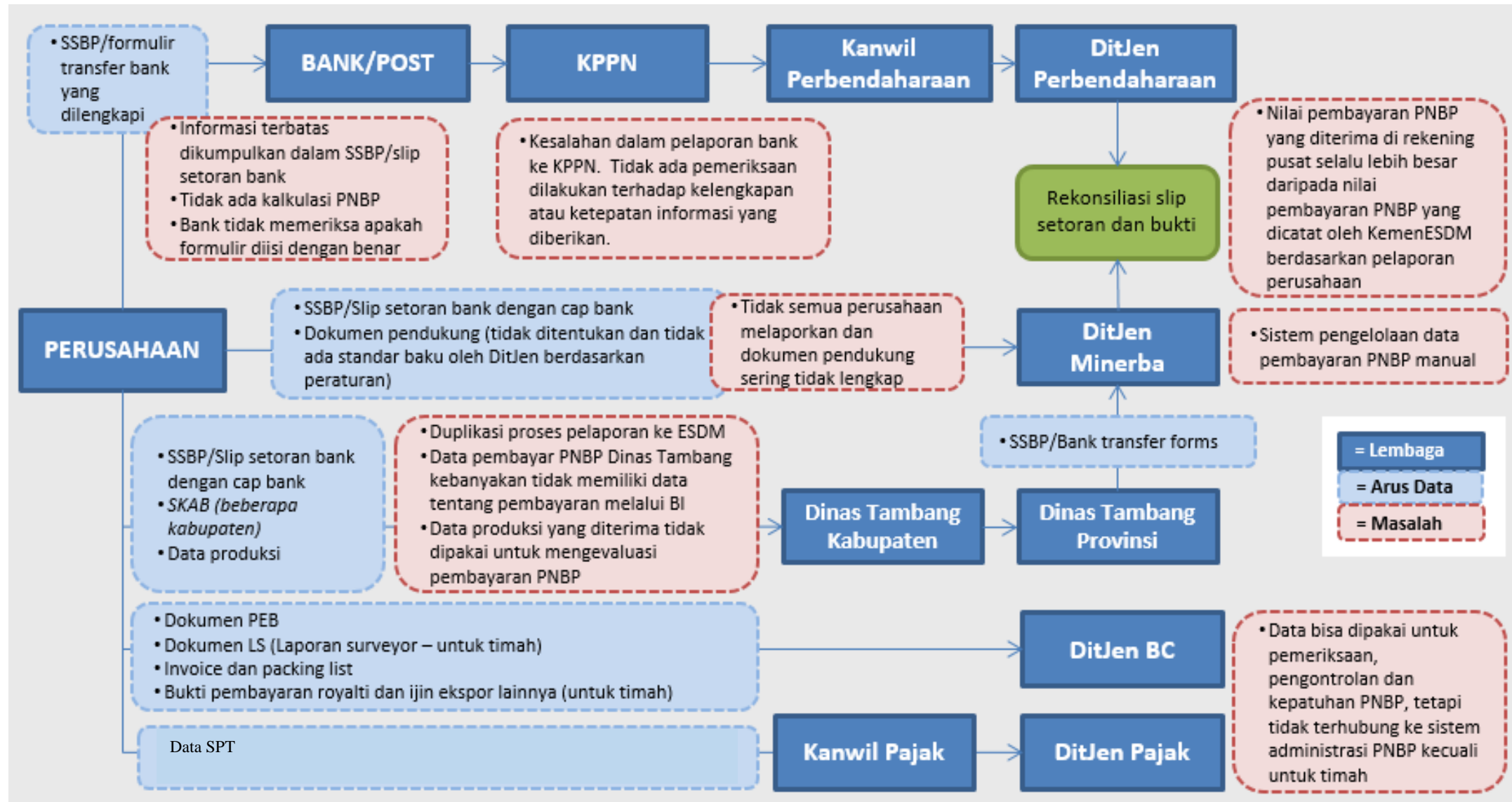
Estimasi potensial PNBP pertambangan dan Realisasi PNBP pertambangan (Tahunan), 2010-12, Miliar Rupiah







Sistem Administrasi PNPB Pertambangan: Arus Data dan Permasalahan





Sistem Administrasi PNBP Pertambangan: Rekomendasi Awal/Jangka Pendek



Jangka Pendek –
Menengah

Memaksimalkan
potensi sistem
SIMPONI yang
baru

- Sistem penagihan PNBP SIMPONI mempunyai potensi untuk meningkatkan administrasi PNBP yang ada secara signifikan dengan memperbaiki kualitas data terkait pembayaran PNBP yang dikumpulkan, mengurangi kesalahan dalam kalkulasi kewajiban PNBP, dan secara sistematis melacak ketidakpatuhan (tidak bayar, telat bayar atau kurang bayar).
- Bagaimanapun, agar SIMPONI dapat mengeksplorasi potensinya secara penuh, diperlukan hal-hal berikut ini :
 - Mendorong atau menerapkan pendaftaran pengguna secara universal ke dalam sistem dan menggunakan sistem untuk penagihan
 - Memasukkan pengecekan dan kontrol validitas dalam sistem untuk mencegah faktor salah input dalam menentukan kewajiban PNBP
 - Menghubungkan data pembayaran tagihan dengan prosedur pengelolaan hutang – penerbitan tagihan royalti, dll.
 - Menentukan protokol untuk berbagi dan mengakses data SIMPONI oleh lembaga pemerintah yang berbeda, terutama KemenESDM
 - Akhirnya menghubungkan SIMPONI dengan catatan ijin terpusat untuk mengidentifikasi kasus tidak bayar
 - Implikasi untuk pelaporan pembayar PNBP. Bila SIMPONI mengumpulkan data pembayaran PNBP pendukung, kebutuhan sebuah sistem pelaporan manual untuk berbagai entitas harus dipertimbangkan kembali

Jangka Pendek-
Menengah

Memperkuat
pengelolaan data
pembayaran
PNBP

- **Data pembayaran PNBP yang diberikan harus dicakup secara elektronik dalam sebuah basis data** (tidak dalam berkas Excel) yang memungkinkan pengecekan dan kontrol dasar secara sistematis/otomatis, contohnya, identifikasi anomali atau nilai yang dianggap berbeda dari rata-rata industri (contohnya, tingkat pengurang, harga) dan ekstraksi data yang akurat dan tepat waktu untuk memfasilitasi pembuatan kebijakan (misalnya realisasi PNBP menurut sektor, provinsi)
- **Basis data harus terhubung dengan daftar ijin terpusat di masa yang akan datang.**



Sistem Administrasi PNBP Pertambangan: Rekomendasi Awal/Jangka Menengah-Panjang



Jangka
Menengah-
Panjang

Memperkuat
pengecekan dan
kontrol
menggunakan
informasi Ditjen
Pajak, Ditjen BC

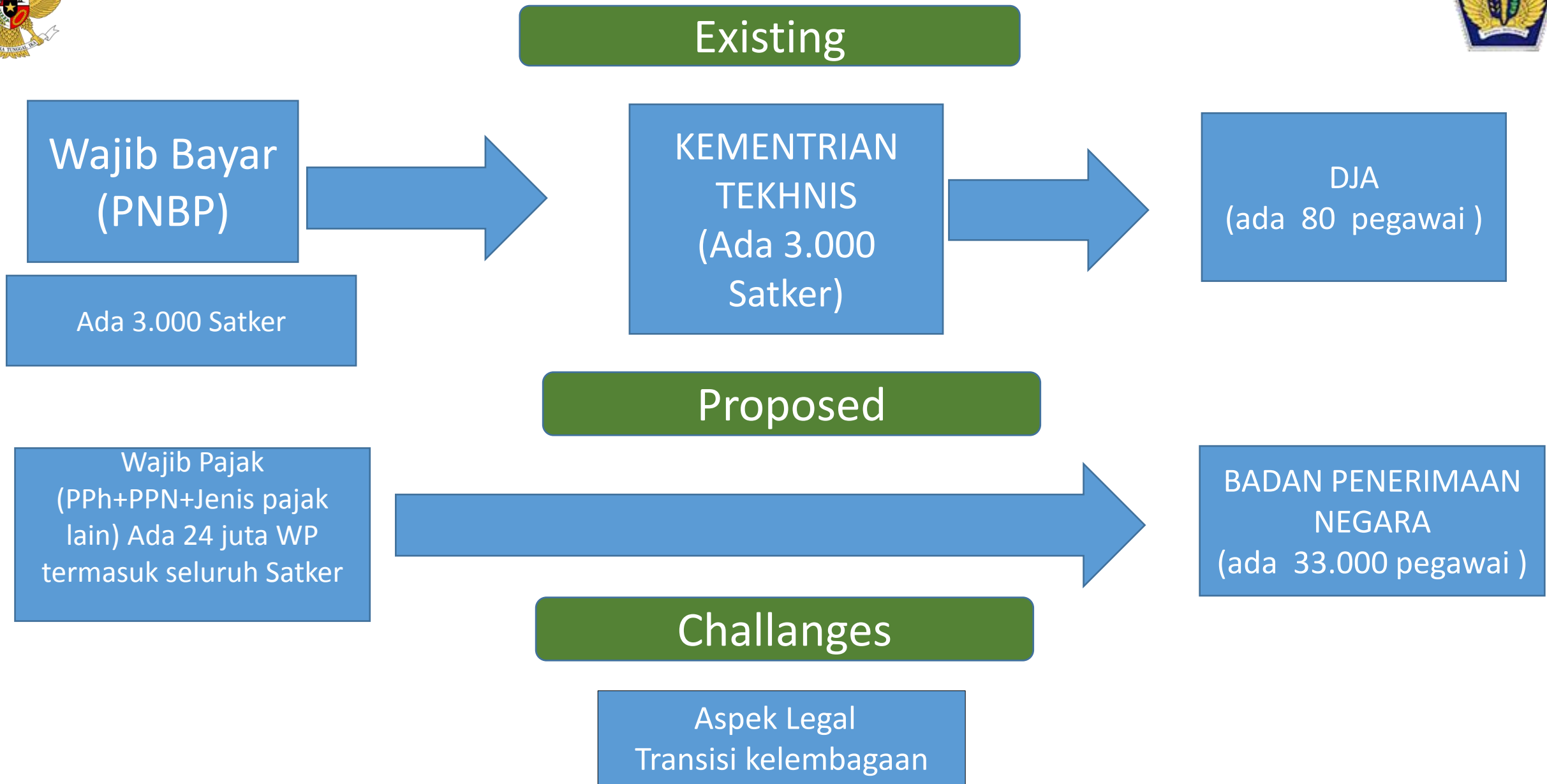
Dengan pertimbangan terhadap batasan kerahasiaan, ada banyak **informasi yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah (Ditjen Pajak, Ditjen BC, BPS) yang bisa dibagikan, dibandingkan dan digunakan untuk keperluan penguatan pengecekan dan kontrol PNBP pada tingkat individual dan agregat :**

- Data ekspor BC bisa digunakan untuk pengecekan nilai produksi yang mendukung pembayaran PNBP pada tingkat individual perusahaan dan agregat
- Informasi dari transportasi tentang semua pengapalan batubara dan mineral dari pelabuhan bisa diperiksa silang dengan informasi royalti
- Pengembalian PPN bernilai besar untuk entitas pertambangan dapat dibandingkan dengan pembayaran royalti; misalnya pengeluaran signifikan yang menyebabkan pengembalian PPN mengindikasikan adanya penjualan signifikan

Jangka Menengah-
Panjang

Memperbaiki
koordinasi lembaga,
pembagian dan
pengaturan
informasi

- **Pembagian informasi antar badan pemerintah penting harus diperkuat;** contohnya, data dari sistem SIMPONI bisa diakses oleh badan yang terlibat dalam pengadministrasian PNBP
- **Melihat peluang untuk menghubungkan pengadministrasian PNBP dengan proses pengadministrasian pajak dan bea cukai** misalnya Ditjen Pajak (Kantor Pajak WB Besar) dan Bea Cukai berkolaborasi dengan KemenESDM





Terima Kasih